

**EVALUASI *CONTROL ACTIVITIES* ATAS *INVENTORY*
BERDASARKAN *COSO INTERNAL CONTROL*
FRAMEWORK PADA UD BALI RAYA
DI TABANAN**

Irma Cahyani Kawi

Jurusan Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika

irmakawi.26@gmail.com

***Abstract** - The results of the analysis and discussion show that the COSO Framework can be implemented in medium-sized enterprises, but not all points in the COSO Framework can be applied well, because in the small and medium enterprises the main emphasis is on the control environment and monitoring, but not the three points others are risk assessments, control activities, and information and communication which also play an important role in internal control. UD Bali Raya is a business entity engaged in the field of trade goods and services. Can be seen if the control activities UD Bali Raya still weak because of the job description is less clear and inadequate documents, so there is still a sequence of functions that occur that can lead to abuse of authority. Recording and documentation is still inadequate. The lack of knowledge of internal controls also makes the owners of UD Bali Raya does not know the controls that should be done on the business.*

Keywords: Internal Control, COSO, Inventory, Effective, and Automotive.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu banyak bermunculan badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang sama. Hal tersebut menjadikan suatu pendorong bagi badan usaha untuk bersaing dengan memberikan kualitas produk yang baik dan harga yang terjangkau untuk memenuhi dan memuaskan keinginan dari konsumen. Suatu perusahaan dagang dapat menjalankan kegiatannya karena adanya persediaan atau *inventory*. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi pada zaman sekarang yang berdampak pada perkembangan dunia usaha serta perkembangan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut

dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa pertumbuhan PDB ekonomi Indonesia triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 tumbuh 5,01 persen mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian triwulan I-2016 sebesar 4,92 persen, pertumbuhan positif ini dialami hampir pada semua sektor yang ada termasuk sektor perdagangan di Indonesia. Neraca perdagangan di Indonesia pada bulan Maret 2016 – Maret 2017 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari 1,66 persen menjadi 3,93 persen, besarnya peningkatan sebesar 2,27 persen. (Badan Pusat Statistik, 2017). Hal tersebut sebagai pertanda bahwa akan terjadi persaingan yang cukup ketat dalam sektor perdagangan, serta munculnya berbagai tuntutan dari konsumen mengenai produk atau barang yang akan dikonsumsi. Salah satu sektor perdagangan yang menawarkan barang dan jasa yang kita sering jumpai adalah supplier oli, supplier ban, supplier accu, dan bengkel mobil.

Terdapat pernyataan bahwa jumlah pelanggan yang melakukan *service* mobilnya di *dealer* resmi Honda mengalami peningkatan sebanyak 4% dari tahun 2014 ketahun 2015 di seluruh bengkel resmi Honda di Indonesia (Honda Indonesia, *Online*, 2016). Terdapat juga beberapa fakta yang menyatakan bahwa hingga saat ini produk pelumas dari PT. Pertamina Lubricants sudah menguasai pasar sekitar 45% dan terus menargetkan agar bisa terus tumbuh dua hingga tiga digit lagi. Penjualan produk pelumas perseroan baik industri dan ritel telah mencapai 450 juta liter atau memiliki pangsa pasar sekitar 60%. Dari total jumlah penjualan itu, sekitar 45%-nya disumbangkan oleh sektor otomotif baik kendaraan roda empat maupun roda dua (Otomotif Bisnis, *Online*, 2017). Setiap tahun, permintaan pelumas meningkat seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi mobil. Pertamina Lubricants mengklaim terus mengalami peningkatan kinerja dalam sektor industri maupun otomotif. Jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2016, Pertamina Lubricants meningkat 2,5% dari total penjualan pelumas Pertamina untuk kedua sektor (Industri Kontan, *Online*, 2017).

Fakta – fakta diatas mengharuskan para pemilik toko sekaligus bengkel non-resmi untuk lebih meningkatkan daya saingnya serta eksistensinya untuk dapat tetap bersaing dengan bengkel resmi dan distributor – distributor besar agar dapat *survive* dan bertahan dalam keberlanjutan usahanya. Karena jika dilihat dari data – data yang dipaparkan diatas, jumlah produksi kendaraan yang semakin meningkat yang dipengaruhi akan jumlah permintaan pasar yang semakin meningkat yang akan mempengaruhi jumlah kebutuhan akan oli, ban, accu atau *service* yang berhubungan dengan kendaraan tersebut meningkat. Yang pada akhirnya akan membuka peluang bisnis bagi orang – orang yang ingin membuka usaha

toko ban, oli, accu dan *service* kendaraan, yang menyebabkan meningkatnya persaingan antar usaha sejenis. Untuk tetap dapat bersaing tentu saja hal pertama yang harus di benahi dalam suatu badan usaha adalah bagian internal dari badan usaha tersebut yaitu pada bagian pengendalian internal. Pengendalian internal atas *inventory* merupakan pengendalian internal utama yang harus dibenahi. Hal ini karena *inventory* merupakan asset utama dan hal yang penting pada usaha dagang. Selain itu, pengendalian internal atas *inventory* sangat diperlukan supaya perusahaan dapat memasarkan produk – produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan kondisi saat ini dengan kualitas yang bagus serta harga yang kompetitif, dengan alasan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi.

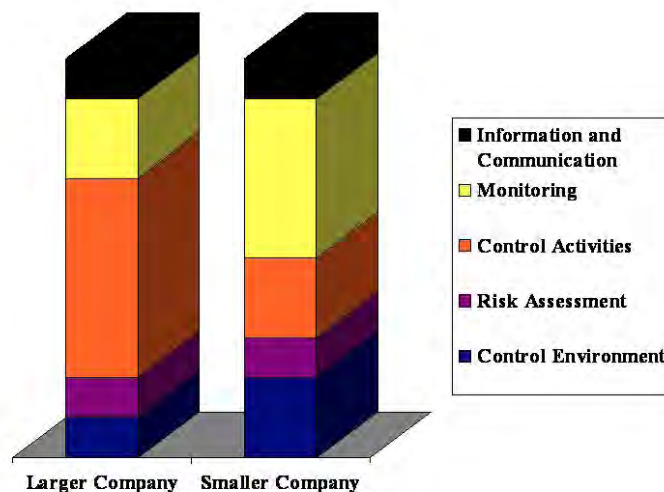
Paper ini membahas mengenai analisis pengendalian internal atas *inventory* berdasarkan *COSO Internal Control Framework* untuk menunjang keberlangsungan dari UD Bali Raya yang merupakan badan usaha yang bergerak dibidang otomotif yaitu menawarkan barang dan jasa yang mengacu pada standar *COSO Framework* dengan satu komponen yang terdapat didalamnya yaitu *Control Activities* (aktivitas pengendalian).

TELAAH TEORITIS

The COSO *report* mendefinisikan *internal control* berikut ini (Kell, 2001) “*Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable regarding the achievement of objectives in the following categories: reliability of effectiveness and efficiency of operations*”. Terdapat lima komponen pengendalian internal berdasarkan COSO yaitu *Control Environment, Risk Assesment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring*.

Dalam perkembangannya, COSO kemudian juga menerbitkan beberapa publikasi diantaranya untuk *enterprise risk management (2004), small entities (2006), dan monitoring (2008)*. *Internal control guidance for Small Public Companies* (COSO: 2006), menggambarkan perusahaan “kecil” adalah perusahaan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut (a) Line bisnis yang relatif sedikit, dengan jenis produk terbatas dalam line tersebut, (b) Konsentrasi pemasaran pada distribusi atau geografi, (c) Kepemimpinannya adalah dengan manajemen yang mempunyai kepemilikan signifikan, (d) Tingkatan manajemen relative lebih sedikit dengan spans of control yang lebih lebar, (e) System proses transaksi kurang kompleks, (f) Personel lebih sedikit dengan tanggung jawab yang lebih besar, dan (g)

Mempunyai kemampuan terbatas untuk menyediakan sumber daya pada lini dan supporting unit seperti bagian hukum, sumber daya manusia, akuntansi, dan internal auditing.



Sumber : COSO Framework Guidance For Smaller Public Company

Menurut *COSO Framework Guidance For Smaller Public Company* menyatakan bahwa tidak semua perusahaan, baik perusahaan tersebut bersekala besar atau kecil akan menerapkan pengendalian internal dengan cara yang sama. Melihat cara perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar dalam menerapkan komponen *COSO Framework*, kita dapat melihat adanya perbedaan dalam penerapannya. Semua perusahaan, terlepas dari ukurannya, perlu memiliki komponen yang terdapat dalam *COSO Framework*, tetapi ketergantungan dan kebutuhan pada setiap komponen berbeda di perusahaan yang lebih kecil dengan di perusahaan yang lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2011), perusahaan berskala kecil dan menengah menghadapi tantangan dalam penerapan sistem pengendalian intern yang efektif. Hal tersebut dikarenakan perusahaan mempunyai sumber daya yang terbatas, karyawan yang terbatas, dan constrain biaya dan manfaat. (Binus Business Review Vol. 2 No. 2 November 2011; 923 – 935)

Keterbatasan pengendalian internal yang sering terjadi pada badan usaha adalah *fraud*. Biasanya ini terjadi karena kurangnya pengawasan pemilik terhadap karyawannya. *Fraud triangle* adalah segitiga yang menunjukkan faktor faktor pemicu kecurangan sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh Donald Cressy tahun 1950. Didalam segitiga tersebut

disebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat memicu kecurangan yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengertian Usaha Kecil yaitu: Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pengertian lain dalam PSAK 14 (2015 : 14.2) “*Inventory* meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali termasuk, sebagai contoh, barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. *Inventory* juga meliputi barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi.”

Menurut Hery (2009), pengendalian internal atas *inventory* seharusnya dimulai pada saat barang diterima (yang dibeli dari pemasok) hingga barang tersebut siap untuk dijual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai fenomena yang telah diketahui sebelumnya dengan mencari penyebab dan penerapan pengendalian internal yang tepat guna meningkatkan efektivitas dalam pengendalian *inventory* dalam menunjang keberlanjutan dari UD BALI RAYA.

Dalam penelitian ini penulis memilih usaha dagang keperluan mobil sebagai obyek penelitian karena penulis tertarik untuk melihat seberapa jauh penerapan suatu internal control dapat berlaku dan dijalankan pada suatu organisasi untuk dapat meningkatkan efektivitas *inventory*, yang selanjutnya dapat membantu penulis dalam memberikan rekomendasi mengenai bagaimana penerapan suatu internal control yang baik.

Metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data

tentang permasalahan yang terjadi terkait dengan pengendalian internal yang dilakukan dalam UD Bali Raya. Metode observasi ini yaitu observasi non-partisipan, dimana dalam observasi ini peneliti akan mengamati bagaimana penerapan sistem pengendalian internal oleh karyawan perusahaan secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan pengamatan secara langsung di lapangan tanpa ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan di observasi. Peneliti juga menggunakan metode analisis dokumen yaitu dimana data-data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi, maupun yang sudah ada akan diverifikasi guna memudahkan menjawab *research question*.

HASIL

Setelah melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian, wawancara langsung kepada pemilik serta karyawan, dan observasi pada toko UD Bali Raya, dapat dilihat beberapa masalah yang terjadi pada UD Bali Raya karena *control activities* yang dilakukan kurang maksimum. Berikut adalah hasil dari evaluasi yang dilakukan terkait dengan *control activities* UD Bali Raya.

Segregation of Duties. Didalam setiap perusahaan harus memiliki job description yang jelas dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perangkapan fungsi yang dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang. Pada UD Bali Raya terkadang masih terjadi perangkapan fungsi yang dilakukan antar karyawan, walaupun karyawan tersebut sudah mengetahui *job description* masing – masing. Sehingga terkandung masih terjadi perangkapan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan khususnya pada bagian *inventory*.

Proper Authorization of Transaction and Activities. Pada aktivitas pembelian *inventory*, yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah pemilik UD Bali Raya. Setiap transaksi penjualan maupun pembelian yang terjadi pada UD Bali Raya yang berhubungan dengan kegiatan operasional badan usaha harus mendapatkan persetujuan dari pemilik terlebih dahulu. Agar semua aktivitas yang terjadi dapat dipertanggung jawabkan bilamana terjadi kesalahan/*error*. Jika terdapat perbedaan harga barang yang akan diberi dari supplier dengan harga barang saat pembelian sebelumnya maka karyawan bagian pembelian harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik.

Design and Use of Documents and Record. Kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh UD Bali Raya mulai dari dokumen untuk permintaan hingga pengeluaran *inventory* masih kurang memadai. Mulai dari catatan untuk memesan *inventory*, kartu stock, catatan pengeluaran barang yang tidak layak serta nota atau faktur yang tidak lengkap. *Prenumbered Consecutively.* UD Bali Raya tidak memberi tanda pada faktur pembelian yang dimiliki. Akan tetapi UD Bali Raya memisahkan faktur pembelian yang dimiliki berdasarkan nama dari supplier. Sedangkan untuk faktur penjualan, UD Bali Raya tidak memiliki salinan dari faktur penjualan karena UD Bali Raya tidak bernah mencatat atau menyalin penjualan yang terjadi. *Prepared At The Time of Transaction.* UD Bali Raya tidak pernah mencatat penjualan atau pembelian yang dilakukan secara terkomputerisasi maupun tercatat secara rapi didalam sebuah buku catatan untuk *inventory / stock card.* *Design For Multiple Use.* UD Bali Raya hanya memiliki dokumen pembelian barang. UD Bali Raya tidak memiliki salinan dokumen penjualan barang. *Constructed To Encourage Preparation.* Tidak ada kolom pemeriksaan pada nota penjualan yang digunakan oleh badan usaha. Begitu juga pada nota pembelian juga tidak ada kolom pemeriksaan. Sehingga pemilik UD Bali Raya biasanya memberikan tanda langsung di depan atau dibelakang jika ada salah atau benar. Tetapi untuk mencatat jumlah barang sudah disediakan kolom pada nota penjualan dan pada faktur pembelian juga sudah tersedia. Serta untuk faktur pembelian sudah terdapat ruang kosong yang berguna untuk authoriasi. Pada faktur penjualan secara kontan tidak terdapat ruang kosong untuk authorisasi, sedangkan pada faktur pembelian secara kredit ada.

Safeguarding Asset, Records, and Data. UD Bali Raya tidak memiliki keamanan yang ketat terhadap penyimpanan *inventory* yang dimiliki, UD Bali Raya tidak menggunakan CCTV atau alat pemantau lainnya. UD Bali Raya juga tidak memiliki petugas keamanan. Walaupun sudah terdapat gudang sebagai tempat penyimpanan *inventory* namun untuk oli kotor dan ban bekas masih belum memiliki tempat penyimpanan yang layak. Pintu dari toko adalah pintu besi yang di gembok dan pintu gudang menggunakan pintu dengan kunci biasa yang kuncinya dibawa oleh pemilik. Sehingga masih terdapat peluang terjadinya pencurian *inventory*. Asset dan dokumen – dokumen penting yang dimiliki oleh UD Bali Raya disimpan didalam brankas dan ada beberapa yang disimpan dilaci kasir yang kuncinya di gantung di dekat kasir. Tidak ada arsip untuk dokumen yang dimiliki UD Bali Raya. Asset berupa kas disimpan di bank oleh pemilik dan ada beberapa yang disimpan di brankas. Jika ada barang

datang maka pengecekan barang datang dilakukan oleh bagian gudang dan di konfirmasi kepada pemilik.

Independent Checks and Performance. UD Bali Raya tidak pernah melakukan pengecekan serta pengevaluasian terhadap kinerja dari karyawannya termasuk karyawan yang bertugas dalam permintaan dan pengeluaran *inventory*. Pemilik hanya memastikan bahwa karyawannya sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan bagian dan tugas masing – masing.

Pemilik tidak mengetahui secara pasti jumlah *inventory* dan asset yang ia miliki diakrenakan pemilik tidak pernah melakukan *stock opname* dan pencatatan yang dilakukan pemilik hanya pencatatan yang sederhana sehingga besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap UD Bali Raya karena pegawai akan dengan mudah melakukan pencurian atau penyelewengan terhadap *inventory* yang dimiliki oleh UD Bali Raya tanpa diketahui oleh pemilik. Kejadian seperti ini pernah terjadi di UD Bali Raya yaitu pada produk accu mobil dan ban mobil. Seperti kejadian pencurian accu baru dan accu bekas yang pernah ditemukan pemilik, jadi pemilik menemukan accu bekas dan baru di kali sebelah toko. Selain itu pada kasus pencurian ban pemilik baru menyadari setelah seorang karyawan berhenti dan ternyata jumlah ban yang terdapat di gudang berkurang, sedangkan dua hari sebelum karyawan berhenti baru saja ada pengiriman ban dari pabrik. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian yang cukup material bagi UD Bali Raya. Kehilangan barang sempad dialami beberapa kali oleh UD Bali Raya. Berikut adalah tabel kerugian yang dialami oleh UD Bali Raya akibat terjadi pencurian, data yang digunakan adalah jumlah kehilangan terbanyak.

Kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh UD Bali Raya mulai dari dokumen untuk permintaan hingga pengeluaran *inventory* masih kurang memadai. Mulai dari catatan untuk memesan *inventory*, kartu stock, catatan pengeluaran barang yang tidak layak serta nota atau faktur yang tidak lengkap. Sehingga menyebabkan susah untuk mengetahui jumlah *inventory* yang masuk dan keluar, yang mengakibatkan terbukanya peluang bagi karyawan untuk melakukan tindakan pencurian *asset* milik UD Bali Raya.

PEMBAHASAN

Segregation of Duties. Tanggung jawab dan wewenang yang ada pada UD Bali Raya belum terdapat secara jelas. Antara divisi satu dengan divisi lainnya dalam UD Bali Raya dapat terjadi perangkapan fungsi. Walaupun sudah terdapat *job description* untuk karyawan. Terkadang para karyawan melakukan aktivitas operasional yang sama, termasuk semua karyawan memiliki akses bebas terhadap barang *inventory* yang dimiliki oleh UD Bali Raya. Penyebabnya adalah karena personel yang dimiliki usaha kecil menengah lebih sedikit dengan tanggung jawab yang lebih besar, seperti yang dikemukakan COSO dalam karakteristik usaha kecil menengah. Pemisahan antara tanggung jawab dan wewenang yang dilakukan pada UD Bali Raya tidak sesuai dengan *COSO Framework*, karena adanya perangkapan fungsi yang terjadi pada aktivitas di UD Bali Raya yang dapat menyebabkan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang jika pemilik tidak melakukan pengawasan secara langsung dan teliti sehingga pemilik yakin kegiatan berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Proper Authorization of Transaction and Activities. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan pada UD Bali Raya pemberian kekuasaan terhadap aktivitas transaksi, aktivitas pembelian, aktivitas penjualan, dan aktivitas penyimpanan *inventory* dilakukan oleh pemilik dari UD Bali Raya. Aktivitas tersebut sudah sesuai dengan standar *COSO Framework* karena pemberian kekuasaan pada UD Bali Raya dilakukan secara tersentralisasi atau terpusat.

Design and Use of Documents and Record. Tidak ada pencatatan khusus yang dilakukan terhadap setiap aktivitas operasional yang terjadi di UD Bali Raya. Badan usaha hanya menggunakan nota penjualan sebagai bukti dari transaksinya. Nota penjualan tersebut hanya satu rangkap jika nota tersebut adalah nota penjualan lunas, jika nota penjualan bon maka nota terdapat dua rangkap. Biasanya pemilik hanya mencatat aktivitas pembelian pada kertas kosong dan menyimpan semua nota pembelian dari pemasok. Setiap tutup toko pemilik akan mencatat berapa penghasilannya selama satu hari tersebut pada buku bergaris. Dokumentasi dan pencatatan yang dilakukan oleh pemilik UD Bali Raya sangat tidak memadai, hal tersebut tidak sesuai dengan *COSO Framework* dimana disebutkan bahwa didalam aktivitas kegiatan operasional perusahaan harus dilengkapi oleh dokumen dengan otorisasi dari pemilik atau bagian yang berwenang. Untuk memperkecil *fraud* yang dapat terjadi pada badan usaha.

Safeguarding Asset, Records, And Data. Asset yang dimiliki oleh UD Bali Raya disimpan oleh pemilik. Pada saat aktivitas penerimaan barang yang baru datang maka pengecekan barang datang dilakukan oleh bagian gudang dan di konfirmasi kepada pemilik, sehingga secara langsung pemilik melakukan pengawasan. Dalam menjaga *inventory* yang dimilikinya UD Bali Raya tidak memiliki sistem keamanan yang ketat dan memadai seperti CCTV dan petugas keamanan. Sehingga perlindungan secara fisik terhadap *inventory* masih kurang efektif. Tidak terdapat pencatatan khusus terhadap *inventory* yang dimiliki oleh UD Bali Raya. Jika ada waktu senggang atau toko sedang kosong maka pemilik akan menginstruksikan karyawan untuk melakukan penataan ulang terhadap *inventory*. Pengendalian terhadap *inventory* pada UD Bali Raya tidak sesuai dengan *COSO Framework*, karena pemilik masih belum dapat memahami betapa pentingnya untuk menjaga *inventory* dalam badan usahanya agar tidak terjadi pencurian ataupun hal – hal lainnya yang dapat merugikan badan usaha dan pemilik tidak konsisten dan komitmen dalam melakukan pengendalian *inventory* secara periodic dan sesuai dengan prosedur.

Independent Checks and Performance. Badan usaha tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun pengevaluasian terhadap kinerja dari karyawannya. Pemilik hanya memastikan bahwa karyawan telah melakukan pekerjaan yang telah ia tugaskan tanpa memeriksa apakah pekerjaan yang dilakukan karyawan tersebut sudah sesuai atau belum. Hal tersebut tidak sesuai dengan *COSO Framework* karena pemilik hanya memastikan jika karyawan telah melakukan apa yang ia tugaskan atau sesuai dengan tugas dari masing – masing karyawan. Sedangkan berdasarkan standar dari *COSO Framework*, suatu badan usaha perlu melakukan evaluasi pada setiap rentang waktu tertentu yang bertujuan untuk mengetahui kinerja dari karyawan dan kesesuaian sistem yang diterapkan perusahaan dengan keadaan dan kondisi perusahaan saat itu.

UD Bali Raya tidak pernah melakukan pencatatan terhadap *inventory* yang dimiliki, pemilik hanya mengandalkan nota pembelian dan ingatannya untuk mengingat dan memeriksa *inventory* yang tersisa atau yang ada. UD Bali Raya juga tidak memiliki *stock card* untuk mengendalikan atau memantau *inventory* yang dimiliki. Selain itu dapat kita lihat bahwa pemilik tidak pernah melakukan stock opname atas *inventory* yang dimilikinya.

Pemilik juga selalu mengawasi proses yang terjadi selama di toko secara langsung, namun jika toko ramai pemilik biasanya pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. *Control activities* yang dilakukan oleh UD Bali Raya dalam rangka menjaga *inventory* yang

dimilikinya masing tergolong sangat lemah, karena pemilik masih beranggapan bahwa ia sudah dapat memantau secara langsung kegiatan yang terjadi walaupun sebenarnya tidak terlalu efektif dan efisien serta pencatatan yang dilakukan masih sederhana sehingga dokumen – dokumen yang dimiliki masih kurang cuup untuk meyakinkan bahwa semua *asset* yang dimiliki oleh UD Bali Raya sudah dikendalikan sengan baik dan seluruh transaksi telah dicatat dengan tepat.

Sebaiknya pemilik melakukan pemisahan fungsi dan melakukan pembatasan akses setiap karyawan terhadap *inventory*. Dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan serta membantu dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pengendalian internal dalam badan usaha. Selain itu sebaiknya pemilik juga melakukan pencatatan barang masuk dan barang keluar, pencatatan sebaiknya dilakuan secara teratur atau secara *periodic*. Pemilik dapat melakukan pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan *stock card*. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk membantu pemilik mengendalikan *inventory* yang dimiliki. Jadi pemilik dapat mengetahui berapa jumlah pasti *inventory* yang dibeli dan *inventory* yang terjual setiap minggu atau bulannya.

Pemilik juga harus melakukan *stock opname* setiap bulannya melihat jumlah *inventory* yang dimiliki badan usaha cukup banyak, sehingga mudah sekali terjadi pencurian *inventory* dan pemilik tidak menyadarinya. Jadi *stock opname* dapat membantu pemilik dalam aktivitas pencatatan *inventory*, sehingga pemilik dapat mengetahui jumlah *inventory* yang ia miliki di gudang dan dengan *inventory* yang ada di pencatatan.

Sebaiknya UD Bali Raya harus memiliki dokumen – dokumen yang berhubungan dengan permintaan *inventory* sampai dengan pengeluaran *inventory*, tujuannya adalah pemilik dapat mengetahui atau memeriksa jika semua *asset* yang dimiliki oleh perusahaan termasuk *inventory* telah dikendalikan dengan baik dan seluruh transaksi yang berhubungan dengan *inventory* sudah dicatat dengan tepat.

Dokumen yang dimiliki oleh UD Bali Raya sebaiknya diberikan penomoran yang bertujuan untuk memudahkan pemilik untuk mengetahui jika ada dokumen yang hilang atau jika membutuhkan dokumen tersebut dikemudian hari. Dan sebaiknya dokumen yang dimiliki atau dibuat dirancang agar dapat digunakan lebih dari satu fungsi, misalkan satu dokumen bisa digunakan untuk pengeluaran barang dari gudang serta dapat digunakan sebagai pembaharuan catatan jumlah *inventory*.

Perusahaan sebaiknya memiliki suatu prosedur atau sistem pengamanan untuk menjaga *inventory* atau aset perusahaan serta memiliki satu dokumen yang memiliki format yang sudah terstandar guna mencegah atau menghindari penyalahgunaan yang dapat terjadi dalam badan usaha. Dan melakukan evaluasi setiap periode waktu tertentu.

Dengan melakukan evaluasi seperti yang telah penulis lakukan, maka kita dapat mengetahui apakah pengendalian internal atas *inventory* yang telah dilakukan oleh badan usaha yang memiliki skala kecil menengah seperti UD Bali Raya sudah efektif, efisien, dan sesuai dengan *control activities* pada *COSO Framework*. Serta dapat mengetahui pengendalian internal atas *inventory* yang harus dilakukan guna menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja dari UD Bali Raya berdasarkan *COSO Framework*. Kita juga dapat mengetahui kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh UD Bali Raya dalam menerapkan pengendalian internal berdasarkan *COSO Framework*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya penerapan komponen pengendalian internal seperti yang terdapat dalam *COSO Framework* dapat diterapkan pada badan usaha yang berskala kecil menengah seperti UD Bali Raya. Semua perusahaan, terlepas dari ukurannya, perlu memiliki komponen yang terdapat dalam *COSO Framework*, tetapi ketergantungan dan kebutuhan pada komponen tersebut berbeda di perusahaan yang lebih kecil dengan di perusahaan yang lebih besar. Namun seperti yang dipaparkan oleh *COSO Framework Guidance For Smaller Public Company*, tidak semua perusahaan, baik perusahaan tersebut bersekala besar atau kecil akan menerapkan pengendalian internal dengan cara yang sama. Penyebabnya adalah karena perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki skala kecil menengah dengan perusahaan besar.

Beberapa diantaranya adalah jika perusahaan yang memiliki skala kecil menengah pasti memiliki keterbatasan SDM, berbeda dengan perusahaan berskala besar yang memiliki SDM yang cukup banyak. Selain itu yang membedakan adalah karyawan yang di rekrut pada perusahaan berskala besar pasti minimal harus S1 atau seajarnya dan memiliki wawasan yang lebih luas mengenai akuntansi, pencatatan, dan wawasan lainnya, berbeda dengan karyawan yang di rekrut oleh perusahaan yang berskala kecil menengah.

Selain itu karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh perusahaan berskala kecil dan segala aktivitas yang terjadi pada badan usaha didominasi oleh pemilik, hal tersebut tidak dapat dihindari sehingga penentu pengendalian internal dari badan usaha skala kecil menengah adalah pemilik dari badan usaha itu sendiri. Selain itu pemahaman pemilik mengenai pengendalian internal yang sangat terbatas juga mempengaruhi penerapan dari pengendalian internal tersebut.

Control activities UD Bali Raya yang masih kurang baik dan efektif dapat dilihat terdapat perangkapan fungsi yang terjadi pada UD Bali Raya karena *job description* yang kurang jelas yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan karena peraturan dan tujuan organisasi belum didokumentasikan oleh pemilik dan informasi yang ada belum dikomunikasikan secara memadai kepada seluruh karyawan. Selain itu UD Bali Raya juga tidak melakukan pelatihan atau penyuluhan pada karyawannya, sehingga kualitas dari karyawan biasa saja. Pemilik juga tidak pernah melakukan pengevaluasian terhadap kualitas kinerja dari karyawan yang dimilikinya.

Selain itu UD Bali Raya juga memiliki kelemahan lain yaitu pada sistem pencatatan atas *inventory* yang dilakukan oleh UD Bali Raya sangat tidak memadai, karena UD Bali Raya tidak pernah mencatat adanya barang masuk atau barang keluar, UD Bali Raya hanya mengandalkan nota pembelian dan keadaan fisik barang untuk memeriksa *inventory* yang dimiliki. Kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh UD Bali Raya mulai dari dokumen untuk permintaan hingga pengeluaran *inventory* masih kurang memadai. Mulai dari catatan untuk memesan *inventory*, kartu stock, catatan pengeluaran barang yang tidak layak serta nota atau faktur yang tidak lengkap. Tidak ada arsip untuk dokumen yang dimiliki UD Bali Raya.

UD Bali Raya tidak memiliki keamanan yang ketat terhadap penyimpanan *inventory* yang dimiliki, UD Bali Raya tidak menggunakan CCTV atau alat pemantau lainnya. UD Bali Raya juga tidak memiliki petugas keamanan. Sehingga masih terdapat peluang terjadinya pencurian *inventory*. UD Bali Raya tidak pernah melakukan pengecekan serta pengevaluasian terhadap kinerja dari karyawannya termasuk karyawan yang bertugas dalam permintaan dan pengeluaran *inventory*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, D. (2012). *Evaluasi Pengendalian Internal terhadap Siklus Pendapatan pada PD. Palem Star Aluminium*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Edisi 84. [On-Line]*. Available: https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Laporan-Bulanan-Data-Sosial-Ekonomi-Mei-2017.pdf (diakses pada tanggal 28 Mei 2017)
- Committee of Sponsoring Organisations (COSO). (2006). *Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies*. New York, NY: COSO
- COSO. 2013. *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance*. [On-Line]. Available: <https://www.coso.org/Pages/default.aspx> (diakses tanggal 29 Mei 2017)
- Dillard, Jeremy. 2014. *How COSO Changes Will Affect Small Business*. [On-Line]. Available: https://www.aicpastore.com/Content/media/PRODUCER_CONTEET/Newsletters/Articles_2014/CPA/MAY/COSOchanges_small_businesses.jsp (diakses tanggal 11 April 2018)
- Hery. (2009), *Akuntansi Intermediate Ilustrasi Problem Dan Solusi*, Edisi 1, Grasindo, Jakarta..
- Honda Indonesia. 2016. *Honda Raih Pertumbuhan Penjualan 109,4% Pada Tahun 2015*. [On-Line]. Available: <https://www.honda-indonesia.com/news-room/latest-news/2636/honda-raih-pertumbuhan-penjualan-1094-pada-tahun-2015> (diakses pada tanggal 28 Mei 2017)
- IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kell, Walter G, Raymond N Johnson, William C Boynton. 2001. *Modern Auditing*. Seventh Edition. New York: John Willey & Sons Inc.
- Kurniawati, Heny.2011. *Sistem Pengendalian Intern Pada Perusahaan Kecil Dan Menengah*. Vol.2 No. 2 November 2011
- Rafael, Christoffel. 2017. *Kontan, Penjualan Pelumas ke Industri Terus Menguat* [On-Line]. Available: <http://industri.kontan.co.id/news/penjualan-pelumas-ke-industri-terus-menguat> (diakses tanggal 28 Mei 2017)

Securities Exchange Commission Advisory Committee on Smaller Public Companies. (2006).

Final Report of the Advisory Committee on Smaller Public Companies to the U.S. Securities and Exchange Commission.

Sukatama, Wiangga. 2016. Auto 2000, Dealer Toyota Paling Laris 2015. [On-Line].

Available:<http://otomotif.bisnis.com/read/20160120/275/511445/auto-2000-dealer-toyota-paling-laris-2015> (diakses pada tanggal 28 Mei 2017)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah